

**SKRIPSI**

**PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI  
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

*The Role Of The Camat In Government Administration In The Plampang Sub-  
District, Sumbawa District*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam  
memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi  
publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Mataram



**OLEH :**

**ASZA WULANDARI**

**216110108**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2021**

**HALAMAN  
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian Skripsi**

**Program Studi Administrasi Publik pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 09 Maret 2021**

**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)  
NIDN. 0822048901

**Dosen Pembimbing II**



(Iwin Ardyawin, S.Sos., M.A)  
NIDN. 0818059002

**Mengetahui,  
Program Studi Administasi Publik  
Ketua**



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)  
NIDN. 0822048901



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASZA WULANDARI

NIM : 216110108

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 09 Maret 2021



ASZA WULANDARI  
NIM. 216110108



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASZA WULANDARI  
NIM : 216110108  
Tempat/Tgl Lahir : Tabase 01 April 1998  
Program Studi : Administrasi Publik / Pembangunan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 082341 971161 / aszawulandari98@gmail.com  
Judul Penelitian :-

Peran camal dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Prampung Kabupaten Sumbawa

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 60% 45%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Maret 2021

Penulis



Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASZA WUCANDARI  
NIM : 216110108  
Tempat/Tgl Lahir : Tabase, 01 April 1998  
Program Studi : Administrasi Publik / Pembangunan  
Fakultas : FISIPO  
No. Hp/Email : 0823A19716 / aszawucandari98@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pampang Kabupaten Sumbawa

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Maret 2021

Penulis

  
NIM. 216110108  
ASZA WUCANDARI

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (QS. Al Isyirah 6-7)

Asza Wulandari:

### DIPERSEMBAHKAN OLEH:

1. Kedua orang tua saya Bapak Zakariah dan ibu Hasmawati, Hidup terasa mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
2. Untuk saudara kandung saya dan keluarga besar saya terimakasih atas dorongan dan semangatnya.
3. Untuk teman saya Rena Maulidiana, S.AP dan Jibril Suprianto, S.Pd, yang selalu meberikan semnagta pada saat setres dalam dunia skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2016, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
5. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2020.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Plampang Kabuapten Sumbawa”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

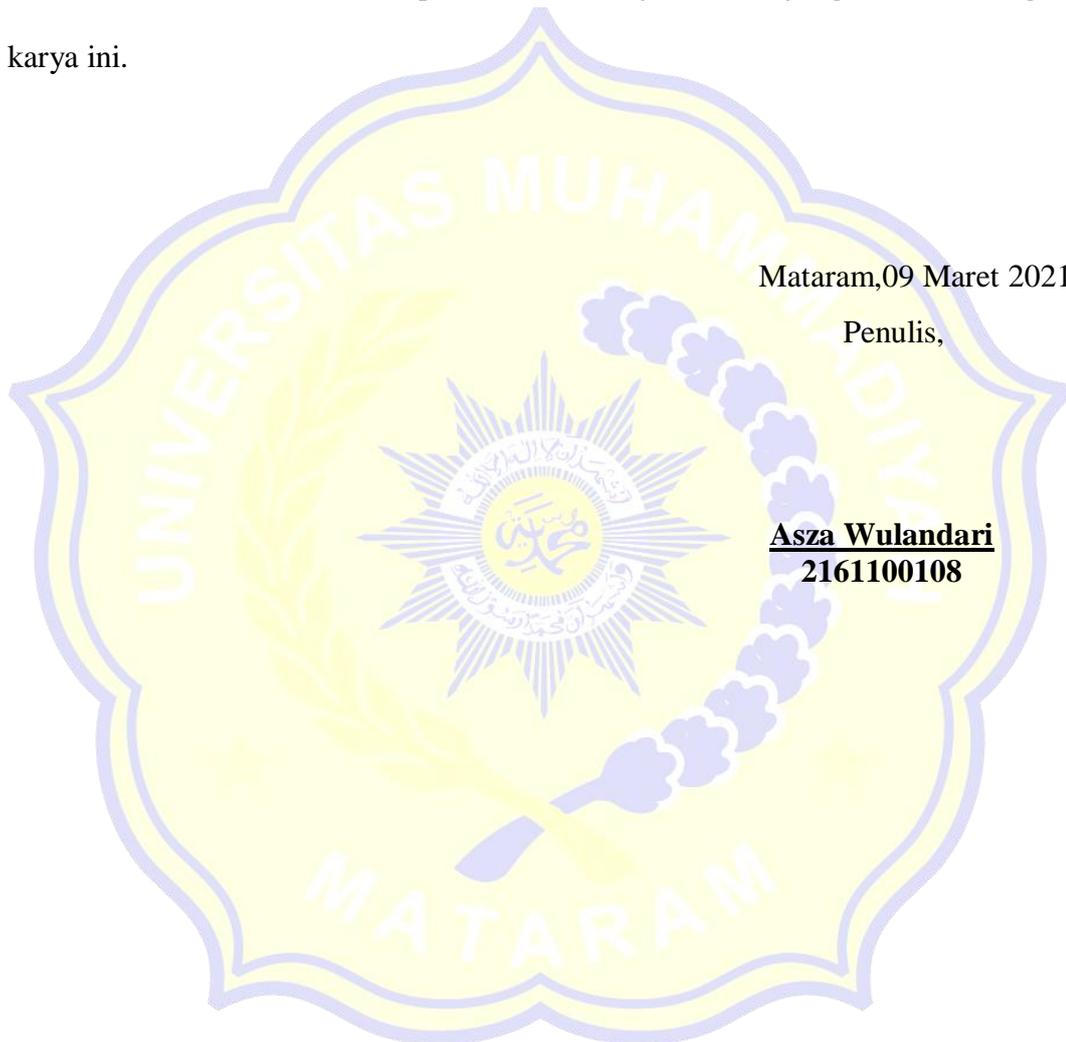
1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Iwin Ardyawin, S.Sos.,MA selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi.
5. Ibu Mardiah, S.sos., M.Si sebagai penguji utama
6. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 09 Maret 2021

Penulis,

**Asza Wulandari**  
**2161100108**



**PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI  
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA**

**Disusun Oleh:**

**Asza Wulandari<sup>(1)</sup>, Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP<sup>(2)</sup>, Iwin Ardyawin<sup>(3)</sup>, dan  
Mardiah S.Sos., M.Si<sup>(4)</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Skripsi, 09 Maret 2021

**ABSTRAK**

Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabuapten Sumbawa, Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Sumbawa, dengan metode penelitian yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. dengan hasil penelitian yaitu Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Plampang kabupaten sumbawa telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan plampang. Adanya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Plampang, adanya kerjasama dengan kepolisian RI di wilayah Kecamatan yang dapat membantu serta menjaga kegiatan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan plampang, dan merupakan implementasi peran yang di buktikan di Kecamatan Plampang.

**Kata Kunci :Peran, Kecamatan dan Pemerintahan.**

**THE ROLE OF THE HEAD SUB-DISTRICT GOVERNMENT IN ORGANIZE  
THE GOVERNMENT AT PLAMPANG SUB-DISTRICT, SUMBAWA**

**Azza Wulandari<sup>1</sup>, Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP<sup>2</sup>, Iwin Ardyawin<sup>3</sup>, dan  
Mardiah S.Sos., M.Si<sup>4</sup>**

Public Administration Study Program  
Faculty of Social and Political Science  
Muhammadiyah University of Mataram  
Thesis, March 2021

**ABSTRACT**

The sub-district government is one of the supra village institutions. One of its duties is to provide guidance and supervision to the orderliness of the village administration. This study aims to determine the role of the head sub-district government administration in Plampang sub-district, Sumbawa. The research method used descriptive qualitative. The results of this study indicated that there was community participation in development planning deliberation forums at the sub-district level, and build cooperation with the Indonesian police in the Plampang sector. The conclusion of this study is that the head of the sub-district can have an influence on increasing community participation in organizing the government of the Plampang sub-district.

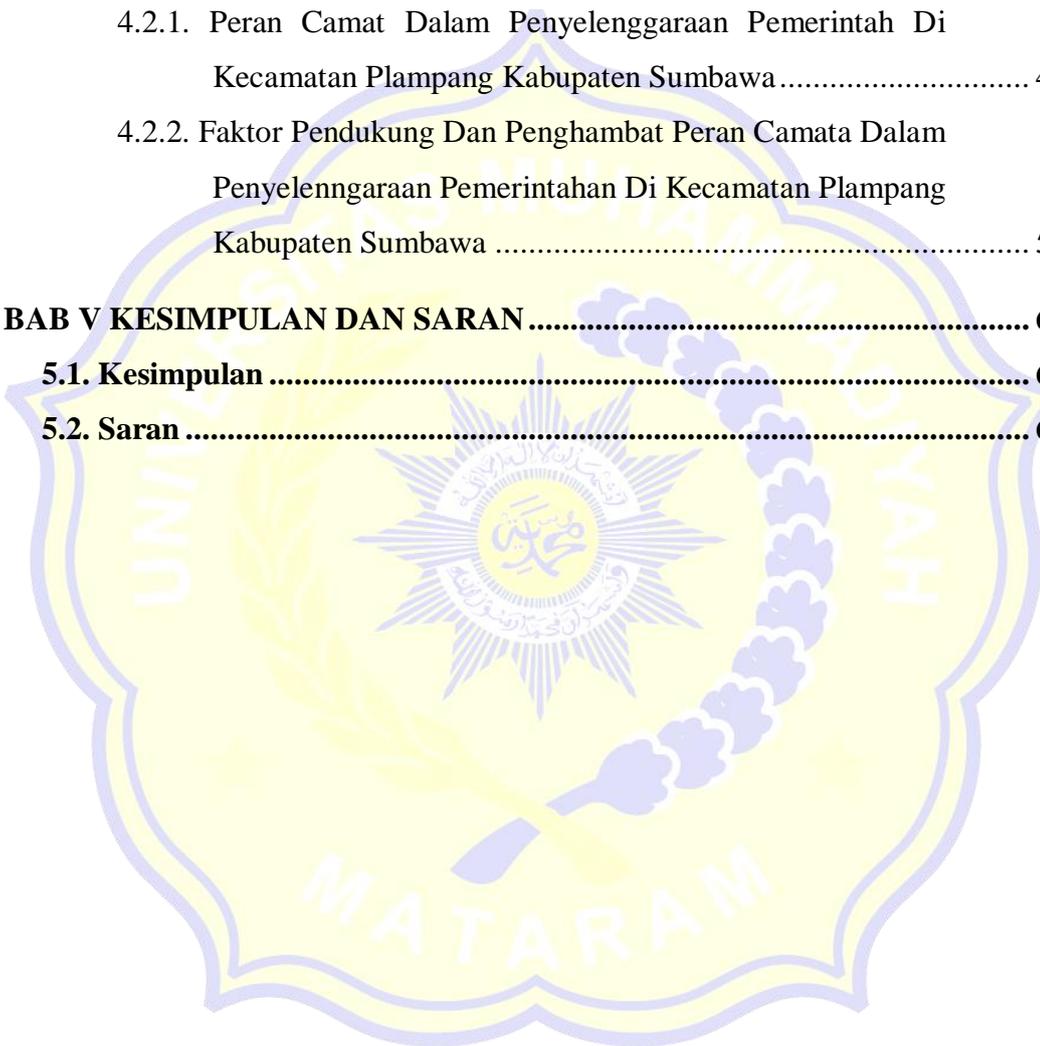
Keywords: Role, Sub-District and Government.



## DAFTAR ISI

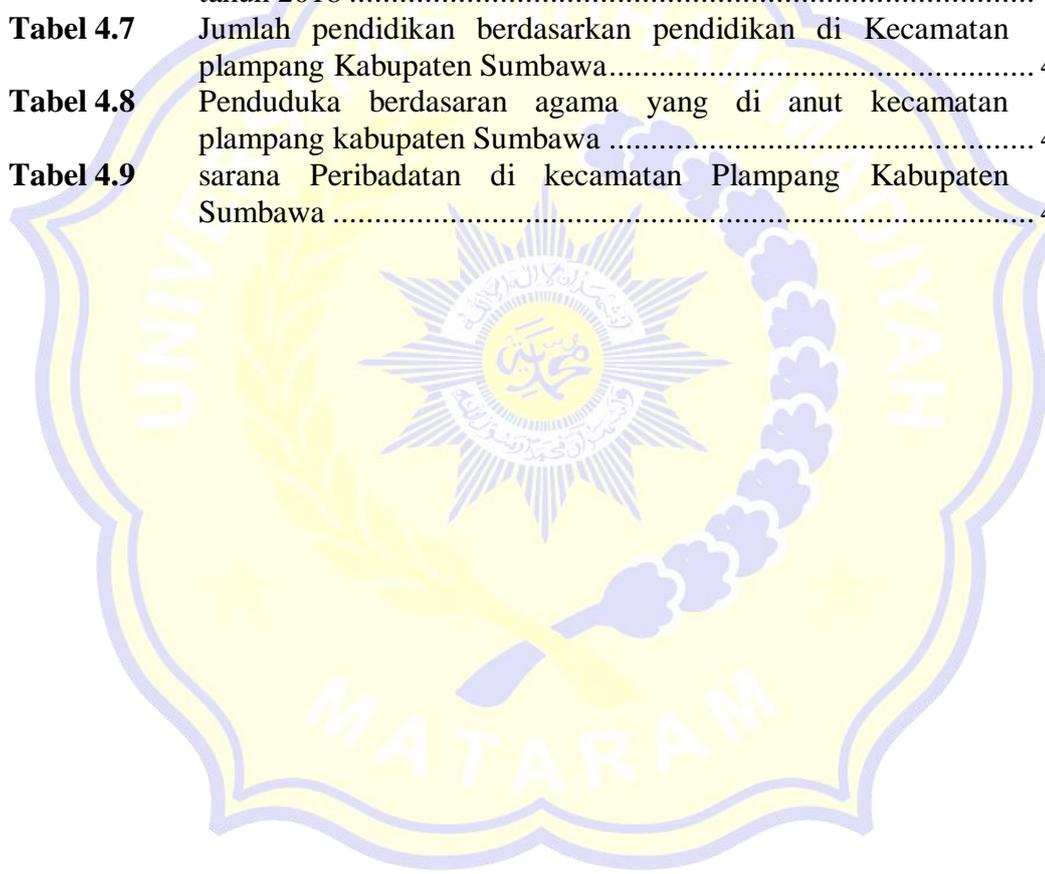
|   |             |
|---|-------------|
| <b>COVER .....</b>                              | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAC.....</b>                             | <b>x</b>    |
| <b>DATAR ISI .....</b>                          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                       | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                       | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                       | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                    | 6           |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                | <b>8</b>    |
| 2.1. Penelitian terdahulu .....                 | 8           |
| 2.2. Landasan Teori.....                        | 10          |
| 2.2.1. Konsep Peran .....                       | 10          |
| 2.2.2. Aspek-Aspek Peran .....                  | 12          |
| 2.2.3. Bentuk-Bentuk Peran.....                 | 14          |
| 2.2.4. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran ..... | 15          |
| 2.2.5. Konsep Camat .....                       | 16          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>27</b>   |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                     | 27          |
| 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....          | 28          |
| 3.3. Penentuan Informan.....                    | 28          |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data.....                 | 28          |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 32        |
| 4.6. Teknik Analisis Data .....  | 32        |
| 4.7. Kebasahab Data.....   | 33        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN .....</b>  | <b>35</b> |
| 4.1. Sejarah Umum Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa .....   | 35        |
| 4.2. Hasil Dan Pembahasan .....  | 45        |
| 4.2.1. Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di<br>Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.....  | 45        |
| 4.2.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Camata Dalam<br>Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Plampang<br>Kabupaten Sumbawa ..... | 53        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>5.1. Kesimpulan .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>5.2. Saran .....</b>  | <b>62</b> |



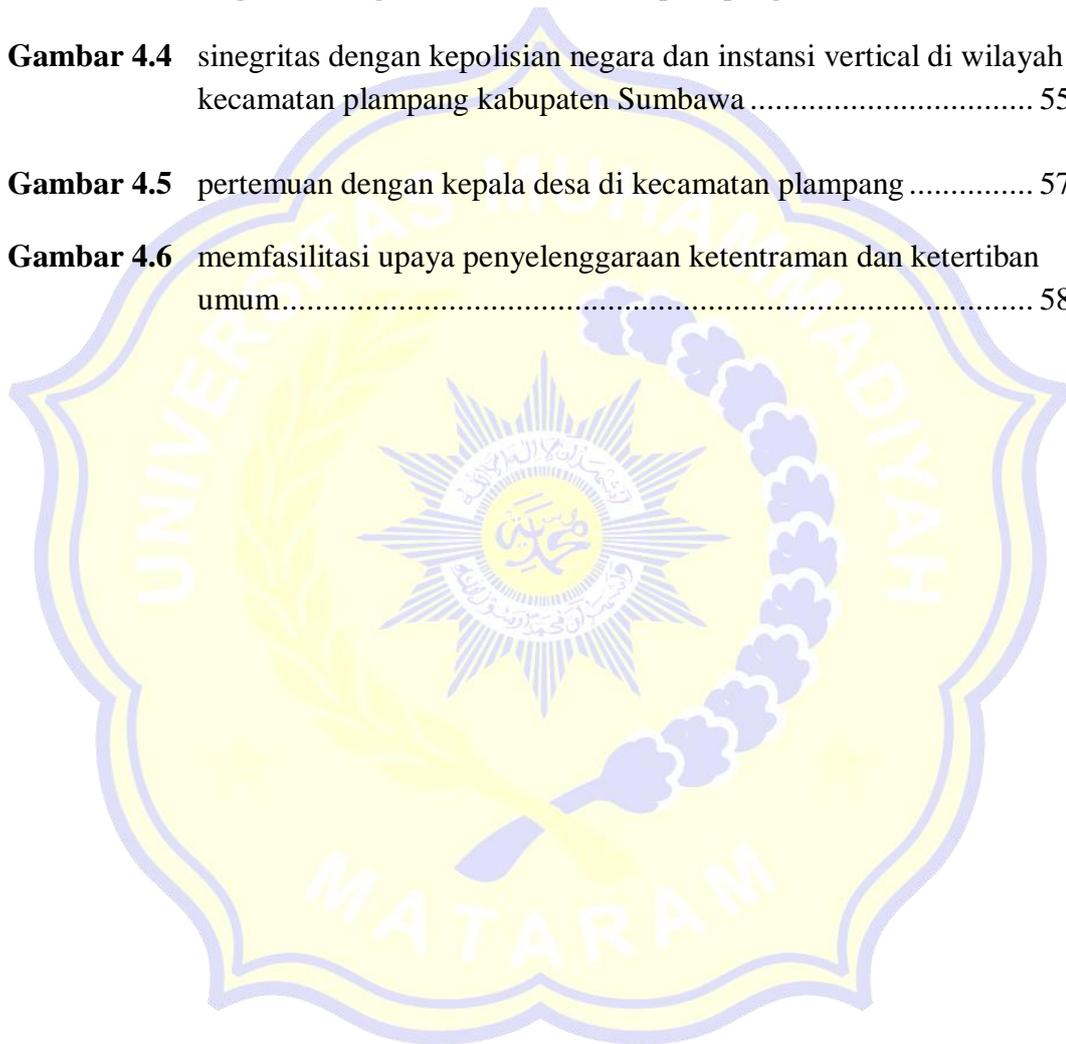
## DAFTAR TABEL

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| <b>Tabel 4.1</b>  | Tabel Desa Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.....  | 38 |
| <b>Tabel 4.2</b>  | Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa 2018 .....   | 39 |
| <b>Tabel 4.3</b>  | Pembagian Wilayah Administrasi Berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Menurut Desa Tahun 2018.....      | 40 |
| <b>Tabel 4.4</b>  | lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Menurut Desa Tingkat Perkembangan .....                              | 40 |
| <b>Tabel 4.5.</b> | Jumlah Penduduk, Jalur Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2017-2018 ..... | 42 |
| <b>Tabel 4.6</b>  | Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan rata-rata jiwa per satu tahun 2018 .....                                    | 42 |
| <b>Tabel 4.7</b>  | Jumlah pendidikan berdasarkan pendidikan di Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa.....                         | 43 |
| <b>Tabel 4.8</b>  | Penduduka berdasar agama yang di anut kecamatan plampang kabupaten Sumbawa .....                              | 44 |
| <b>Tabel 4.9</b>  | sarana Peribadatan di kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa .....  | 45 |



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1** Peran Camat Dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kabupaten Sumbawa ..... 46
- Gambar 4.2** Partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kecamatan plampang kabupaten Sumbawa..... 47
- Gambar 4.3** Kegiatan Keagamaan di kecamatan plampang ..... 53
- Gambar 4.4** sinegritas dengan kepolisian negara dan instansi vertical di wilayah kecamatan plampang kabupaten Sumbawa ..... 55
- Gambar 4.5** pertemuan dengan kepala desa di kecamatan plampang ..... 57
- Gambar 4.6** memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum..... 58



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Koeswara (2007:2) pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan

terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam pemerintahan kecamatan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi,

dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib. Lembaga supra desa dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa. (Koeswara, 2007, h.3).

Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yang terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dengan jarak 63 km dari Ibukota kabupaten. Ketinggian rata-rata Kecamatan Plampang 10,05 meter diatas permukaan air laut (menurut Kompas dari petugas Geografi tanggal

25 Agustus 1990). Luas wilayah Kecamatan Plampang adalah 418,69 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 27.834 jiwa. Desa di Kecamatan Plampang berjumlah 12 desa, terbagi menjadi 11 desa berstatus definitif dan 1 desa UPT. Tahun 2002, Kecamatan Plampang mengalami pemekaran menjadi 2 kecamatan plampang dan kecamatan Labangka. Tahun 2004 terjadi pemekaran kembali menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge. Kecamatan Plampang terdiri dari 12 desa yang dapat di klasifikasikan dalam 9 desa swakarya, 2 desa Swasembada dan 1 desa UPT. Demi terselenggaranya roda pemerintahan desa yang berjalan dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat di tingkat desa, maka di perlukan perangkat-perangkat pendukung seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Kecamatan Plampang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bantu oleh 12 Kepala Desa, 44 Kepala Dusun, 89 Ketua RW serta 213 Ketua RT. (<http://geoportbankdatasumbawa.net/public/kecamatan/5204130> diakses pada tanggal 12 februari 2020 Pkul 19.00 WITA)

Dilihat dari jumlah Kepala Desa, Ketua RW dan ketua RT di Kecamatan Plampang sangat banyak, dan dari jumlah tersebut bisa kita melihat bagaimana peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Plampang itu sendiri, apakah sudah efektif dan efisien dalam mengurus semua Desa yang ada di Kecamatan Plampang. Kecamatan Plampang merupakan salah satu penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintah di

Indonesia, kecamatan Plampang yang memiliki visi “terwujudnya Kecamatan Plampang yang handal dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa” mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penyelenggara Pemerintah Desa yang banyak di Kabupaten Sumbawa, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Plampang ini. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu Kecamatan Plampang telah memperbaiki akses jalan ke salah satu desa di Kecamatan Plampang yaitu Desa Spayong pada tahun 2019 dan Kecamatan Plampang juga telah merencanakan pembangunan pelabuhan Teluk Santong yang fungsinya untuk mendukung industrialisasi dan mempermudah ekspor barang serta menggeliatkan perekonomian masyarakat, karena akan ada banyak tenaga kerja lokal yang dapat diserap dan masyarakat sekitar pelabuhan juga akan mendapat penghasilan tambahan dengan adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Teluk Santong.

Berbeda dengan Kecamatan Empang yang memiliki 10 Desa, 39 Dusun, 62 RW, dan 173 RT dan Semua desa di Kecamatan Empang merupakan desa Swasembada, kecamatan Empang pada akhir tahun 2018 mulai merenovasi dermaga ikan yang terletak di labu jontal, hal tersebut sangat berbeda sekali

dengan kecamatan plampang yang merenovasi Kantor camat dan merenovasi jalan yang ada di desa Spayong.

Dalam uraian latar belakang tersebut, menunjukkan adanya gejala sosial yang menarik untuk dikaji dalam meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa”**.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. untuk mengetahui Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
2. untuk mengetahui Faktor pendukung dan Penghambat Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Karya ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah terakhir untuk merampungkan studi S-1 dan meraih sarjana pada jurusan urusan publik, program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep Penyelenggaraan Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
3. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Camat dan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintah, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kecamatan Plampang untuk meningkatkan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

## BAB II

### LANDASAR TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama*, penelitian yang di lakukan oleh Yudianto (2014) dengan judul Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa). Denga hasil penelitian Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemimpinan camat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu: Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di

Kecamatan Pallangga cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan di Kecamatan Pallangga dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Faktor kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Suawah (2013), Dengan Judul Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikla Kota Manado. dengan hasil penelitian peran camat sebagai pelaku tugas-tugas pemerintah di wilayah tikala ternyata dari 25 responden yang di wawancarai menyatakan 15 orang atau 60% peranan camat itu baik, sementara 8 orang atau 32% menyatakan bahwa peran camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, sedangkan sisanya menyatakan peranan camat kurang baik. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Aprianti (2009) dengan judul Peranan Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pembinaan Bidang Administrasi). Dengan memperoleh hasil sebagai berikut peran camat sebagai Pembina perangkat desa baik itu melalui ceramah, diskusi pelatihan dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi dan perangkat dan perangkat lembaga-lembaga yang ada belum berjalan sesuai dengan mekanisme dan belum berjalannya fungsi dan tugas pemerintah desa akibat kurangnya pembinaan yang dilaksanakan oleh camat. Kesamaan dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## **2.2.Landasar Teori**

### **2.2.1.Konsep Peran**

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah sebagai berikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. (Soekanto, 2014: 219). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014: 212). Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Setiap individu memiliki perilaku pada posisi sosial yang berbeda dalam masyarakat atau yang disebut dengan peran seperti yang diungkapkan Friedman dalam (Soekanto 2014:145) pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Menurut

Friedmandalam (Soekanto 2014:145) struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. **Peran Formal ( peran yang nampak jelas )**

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia) pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan ( memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

b. **Peran Informal ( peran tertutup )**

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

### **2.2.2. Aspek-Aspek Peranan**

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang

undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang peluang tersebut.

### 2.2.3. Bentuk-Bentuk Peran

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagi istilah dalam teori peran maka ada empat golongan yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. kaitan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam ran sosial tentunya mendukung keberadaannya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah Desa.

### 2.2.4. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara

kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada Desa dalam pemdes yaitu.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal bersekala desa
3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya di fikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

#### **2.2.5. Konsep Camat**

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan

berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4). urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretariat daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wilayah kota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat.

Di samping itu juga camat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang kecamatan dalam BAB II pasal 10 menyatakan bahwa:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 11 ayat (2) selain tugas sebagaimana yang di maksud pasal 10 Camat ,melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
  - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
  - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;
  - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
  - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
  - b. kegiatan berskala kecil;
  - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
8. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain tugas dan pelayanan camat yang di jelaskan di atas, beberapa peran yang di miliki camat dalam menjalankan organisasi birokrasi antara lain:

## 1. Pengawasan

Pengawasan (controlling) adalah salah satu fungsi organik manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan berarti melakukan sebuah proses pengadilan terhadap tugas-tugas yang di kerjakan, pengendalian tersebut adalah penilaian, penilaian dilakukan agar rencana yang telah di tetapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Manulang (2006:173) yang mengatakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Tujuan dari pengawasan ialah untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Fungsi pengawasan adalah agar dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan di ketahui lebih awal maka akan dapat di lakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua masalah dapat diantisipasi.

## 2. Koordinasi

Koordinasi (coordination) sebagai pencapaian usaha kelompok secara

teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari

pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tidak pernah berhenti.
2. Mengandung upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau mensinkronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih

Menurut Soewarno Handyaningrat, mengatakan bahwa : koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.

Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara

yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien) Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.

Jadi makna defenisi diatas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari berbagai fungsi, sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya integrasi dalam kesatuan tindakan yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna

tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.

Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya :

- a) Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal ini merupakan inti koordinasi.
- b) Mencegah terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan yang bersifat lintassektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Tailor dalam Moleong (2004: 26) mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*depth interview*), pengamatan terlibat (*participant observation*), diskusi grup yang terarah (*vocal group discussion*), dan analisis dokumen (*document analysis*).

#### **3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Agustus 2020 sampai selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan kantor Camat Plampang Kanupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Penelitian ini ingin mengetahui dan sudah sejauh mana peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintah itu seperti apa.

### **3.3.Penentuan Informan**

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang di teliti. Informan yang di pilih adalah yang dianggap dalam memberikan informasi mengenai Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa.

Dalam penetian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneltian. Adapun yang menjadi informan yaitu:

1. Camat Plampang
2. Staf Kantor camat Plampang

### **3.4.Jenis Dan Sumber Data**

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer

Menurut Triton P.B, (2007:68) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden atau sampel berdasarkan karakteristkik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut (*purposive sampling*). Dalam hal ini, data berasal dari hasil wawancara yang bertujuan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengnan keadaan tertentu dengan menggunakan pertanyaan

pertanyaan melalui wawancara, observasi dan schedule tentang Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literature-literatur, dokumen, majalah, dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, dan di perlukan suatu penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan (observasi), wawancara, Dokumentasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan data secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

Berikut ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan:

#### 1. Observasi

Proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian di kantor Camat Plampanng Kabupaten Sumbawa.

## **2. Teknik Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawaab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Esterberg dalam ( Sugiyono, 2015) mendefinisikan wawancara adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal daari responden yang lebih mendalam. Wawancaara adalah sebagai dialog yangdilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara atau narasumber.

Menurut Esterberg dalam ( Sugiyono, 2015) mengemukakan beberapa macaam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dalam waawancara terstruktur.

### **1. Wawancara terstruktur**

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan.

## 2. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

## 3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi struktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden. Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antar lain:

1. Camat Plampang
2. Staf Kantor camat Plampang

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk data, dan gambar. Data yang dimaksud di sini adalah data dari hasil wawancara dengan dinas pasar dan beberapa narasumber di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan dan Biklen mengatakanteknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-memilihnyamenjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamka, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diartikan dan penarikan kesimpulan. Dengan reduksi

data penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi

## **2. Penyajian Data**

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kalimat (teks yang bersifat naratif) dan bahasa peneliti yang merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami.

## **3. Penarikan Simpulan**

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### 3.7.Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif ( Moleong, 2007: 320).

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Mengapa perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau keabstran data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau pentatif. Sehingga maksudnya adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu fakto-faktor konstekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

#### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Menurut Patton (1987) (dalam Moleong, 2012: 330) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pencapaiannya melalui :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Moleong (2012: 332) menegaskan bahwa triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat melakukannya dengan cara berikut,

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

